

KORUPSI, RUNTUHNYA EKSISTENSI DEMOKRASI PANCASILA

Hayu Akhul Maslahat, Mellynda Alvinia Zumalaili

Magister Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim

ABSTRAK

Indonesia memiliki 3 lembaga anti-korupsi korupsi yaitu KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri yang seharusnya melakukan koordinasi dalam pemberantasan korupsi oleh para elit politik atau para kapitalis politik yang masuk dalam partai politik, orientasi menguasai pemerintahan menjadikan partai politik lebih berorientasi kepada pemilik modal dan popularitas (kader karbit) daripada menciptakan kader terbaiknya. Sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang untuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Partai politik yang seharusnya menjadi penegak demokrasi, namun kedaulatan yang dimiliki partai politik tidak merepresentasikan kedaulatan rakyat, ketidakpercayaan pada partai politik karena tidak mampu menjembatani aspirasi rakyat kedalam pemerintahan dan berdampak ketidakpercayaan pada system demokrasi. Demokrasi sebagai system yang fleksibel seharusnya tidak berpacu dengan demokrasi dari negara lain, demokrasi Indonesia merupakan demokrasi Pancasila (nilai luhur dalam 5 sila), Pancasila bukan hanya tentang sosial politik, namun pancasila melingkup system ekonomi. pendidikan dan pengamalan Pancasila, Penguatan ekonomi dan peningkatan Pendidikan secara umum sebagai alternatif dalam membenahi system demokrasi di Indonesia yang lebih bermartabat, kemajuan negara serta kesejahteraan rakyat secara umum.

Kata kunci : Pemberantasan Korupsi, Partai Politik, Kapitalis, Demokrasi, Rakyat dan Pancasila.

A. PENDAHULUAN

KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) merupakan sebuah penyakit yang akan menggerogoti tubuh negara indonesia dan menjadi penyakit yang akut yang semakin kuat ada dalam Indonesia, jika tidak segera di ambil tindakan maka akan semakin sulit untuk bisa disembuhkan. Korupsi sebagai bagian dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) sudah menjadi rahasia umum (*public secret*) di era reformasi demokrasi pada saat ini. akan tetapi, tindakan korupsi ini bukan hanya terjadi di era sekarang saja, bahkan di era kolonialisme Belanda juga sudah terdapat tindakan korupsi.

Menurut romanti selaku penulis di halaman Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republic Indonesia, menuturkan “selama masa penjajahan, Belanda memperkenalkan praktik-praktik korupsi, seperti pungutan liar dan suap, yang dilakukan oleh pegawai pemerintah belanda dan penguasa lokal. Selain itu,

sistem birokrasi yang dibangun oleh belanda memberikan banyak kesempatan untuk korupsi dan nepotisme.”¹.

Indonesia telah berusia 79 tahun di tahun 2024 ini, akan tetapi permasalahan korupsi tidak segera mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut, korupsi telah menjadi masalah yang serius karena sangat merugikan negara Indonesia. Meskipun di Indonesia sudah memiliki Lembaga KPK (komisi pemberantasan korupsi) yang telah berusia 21 tahun. Namun KPK juga masih kesulitan untuk memberantas korupsi, bahkan sangat memilukan sekali ketika terdapat informasi bahwa pejabat KPK menjadi tersangka atas tindakan Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan “ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB (Firli Bahuri) selaku ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan grtaifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya”.²

Sangat miris sekali selaku ketua pimpinan yang seharusnya memberantas tindakan korupsi justru melakukan tindakan bagian dari korupsi, ada yang yang lebih miris yaitu kejadian tersebut bukan hanya terjadi sekali saja. Akan tetapi sebelumnya juga pernah terjadi tindakan korupsi yang dilakukan oleh pimpinan atau aparat KPK :

1. Abraham Samad

Abraham samad selaku ketua KPK periode 16 Desember 2011 hingga 18 februari 2015 terbukti memalsukan data kartu keluarga miliknya dengan menempatkan Feriyana Lim sebagai anggota keluarganya. Selain itu, Abraham samad juga melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai pimpinan KPK, dia dituduh menukar keringanan hukum kepada politikus PDI-P Emir Moeis jika dipilih menjadi bakal calon wakil pendamping Jokowi.

2. Bambang Widjojanto

¹ <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/benarkah-budaya-korupsi-indonesia-warisan-belanda/>, 25 April 2023, diakses pada Kamis 11 Juli 2024, 08.36 wib.

² Bbcnews Indonesia, www.bbc.com “ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka atas pemerasan Mantan Syahrul Yasin Limpo”, 23 November 2023, diakses pada Kamis 11 Juli 2024, 09.00 wib.

Bambang widjojanto selaku wakil ketua KPK di era Abraham samad, BW menjadi tersangka memberi keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada kotawaringin barat pada tahun 2010 di Mahkamah Konstitusi.³

Korupsi yang terus merajalela di Indonesia membuat penurunan terhadap indeks persepsi korupsi yaitu dari 40 ke 34. Hal ini disampaikan oleh wakil ketua KPK Alexander Marwata yang telah menjadi bagian dari KPK selama 8 tahun. Selain itu, Alex marwata juga merasa gagal dalam melakukan kerja-kerjanya untuk memberantas korupsi, “saya harus mengakui secara pribadi, delapan tahun saya di KPK, kalau ditanya apakah pak alex berhasil?, saya tidak akan sungkan-sungkan , gagal memberantas korupsi, gagal” kata alex dalam rapat kerja dengan komisi III DPR di senayan”⁴.

KPK sebagai lembaga yang independen hanya seperti slogan saja, independensi yang dilakukan oleh KPK seperti dikebiri oleh sistem yang dibuat oleh pejabat politik, masih menurut alex marwata, beliau mengatakan “pemberantasan korupsi di Indonesia tidak seperti hongkong dan Singapura”⁵. Singapura sebagai negara terbersih ke 5 dunia dan sebagai perwakilan dari ASEAN. Alex juga menambahkan “dua negara (hongkong dan Singapura) hanya memiliki satu Lembaga yang menangani masalah korupsi. Sedangkan di Indonesia memiliki tiga, yakni Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK”⁶.

Penyalahgunaan wewenang dan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat KPK menjadikan semakin diragukannya tingkat independensi terhadap lembaga KPK, sehingga dibuatlah sistem *check and balances* berupa Kejaksaan Agung dan Polri. Namun, Harapan *check and balances* atau supervisi dan koordinasi tidak terjadi. akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya ego sektoral lembaga “ego sektoral masih ada, masih ada. Kalau kami menangkap jaksa misalnya tiba-tiba dari pihak kejaksaan menutup pintu koordinasi supervisi, sulit. Mungkin juga dari pihak kepolisian demikian”.⁷

Penyalahgunaan wewenang bukan hanya terjadi di Lembaga KPK saja. akan tetapi juga terjadi di lembaga kejaksaan agung, terdapat beberapa tindak pidana korupsi yang mereka lakukan seperti :

1. Yanuar Reza Muhammad dan Fristo Yan Presanto kasus jaksa kejati DKI

³ Kompas, www.kompas.com “daftar pimpinan kpk yang terlibat kasus hukum terbaru firli bahuri” 23 November 2023, di akses pada Kamis 11 Juli 2024, 09.05 wib.

⁴ Cnnindonesia, www.cnnindonesia.com “8 tahun di kpk alex marwata merasa gagal berantas korupsi”, senin 01 juli 2024 13.39 wib, diakses pada kamis 11 Juli 2024 09.18 wib.

⁵ ibid

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

2. Eka Safitri jaksa kejar jagat Yogyakarta dan Satriawan Sulaksono Jaksa kejar jagat Surakarta
3. Kusnin Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) kejar jagat Jawa Tengah
4. Agus Winoto Asisten Pidana Umum (Aspidum) kejar jagat DKI Jakarta
5. Ardiyan Nurcahyo staf tata usaha kejar jagat rembang
6. Rudi Indraprasetya kepala kejaksaan negeri pamekasan
7. Parlin Purba kasi III Intel kejar jagat Bengkulu
8. Farizal jaksa kejar jagat padang
9. Devianti Rochaeni jaksa kejar jagat Jawa barat
10. Fahri Nurmollo ketua tim jaksa di kejar jagat Jawa tengah.

Pada kasus YRM dan FYP (kasus no 1) mereka melakukan pemerasan terhadap saksi perkara dugaan tipikor di pidsus DKI Jakarta :

“pada senin (2/12/2019), sekitar pukul 14.50 wib TIM PAM SDO, JAM Intel Kejaksaan Agung mengamankan tiga orang terdiri dari satu orang swasta berinisial CH dan dua oknum jaksa inisial YRM dan FYP. Mereka diduga telah melakukan pemerasan kepada saksi berinisial MY,” kata jaksa Agung RI, ST Burhanuddin.

“MY selaku pelapor mengaku telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1 miliar kepada oknum jaksa YRM dan FYP, melalui [erantara CH. Pelapor menerangkan bahwa ia Kembali diminta sejumlah uang dan sertifikat oleh CH untuk diserahkan pada tanggal 2 desember 2019 “ jelas Burhanuddin.

Selain kasus YRM dan FYP di kejaksaan tinggi Jawa Tengah juga terjadi tindak pidana korupsi oleh Kusnin selaku Aspidsus (Asisten Pidana Khusus), kusnin didakwa menerima suap sebesar 294.000 dollar Singapura (+_ Rp. 3,5 Miliar) dari Alfin Suherman dalam penanganan kasus kepabea⁸.

Selain KPK dan Kejaksaan Agung, Kepolisian RI juga termasuk kedalam Lembaga pemberantas korupsi, terdapat kesamaan lainnya selain menjalankan pemberantasan korupsi, di Lembaga Polri juga terdapat tindak pidana korupsi dari korupsi skala kecil sampai korupsi skala besar. Dari banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh Lembaga pemberantasan korupsi ternyata Lembaga KPK tidak sebanyak kasusnya daripada Kejaksaan Agung, begitu juga kejaksaan agung tidak sebanyak kasusnya daripada Lembaga Polri. Sudah terlalu banyak contoh oknum terjerat kasus korupsi di lembaga KPK di Lembaga kejaksaan agung, sehingga untuk lembaga Polri tidak perlu diberikan contoh siapa saja oknum-oknum yang telah melakukan KKN.

⁸ Medistiara yulida, www.news.detik.com “deretan jaksa yang malah diadili karena kasus korupsi”, Selasa 28 April 2020, diakses pada Kamis 11 Juli 2024 22.50 wib.

Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian dari ISSSES (*institute for security and Strategic studies*) mengatakan praktik suap, setoran maupun pungli terjadi di hampir semua sektor kepolisian “suap ini hanya hilirnya, hulunya adalah setoran ke atasan-atasannya. Ini terjadi di hampir semua satuan, tentunya dengan pola yang berbeda. Di reserse misalnya, terkait penegakan hukum dengan memainkan pasal . di satlantas (satuan lalu lintas) melakukan pungutan di jalanan dan penerbitan SIM. Bahkan di internal juga, terkait promosi jabatan misalnya, itu berbiaya mahal. Kalau ingin ditempatkan penempatan yang lebih basah atau jabatan yang lebih penting ya setor lagi ke SDM sudah mengakar ya”⁹.

Kinerja Polri kembali disorot oleh masyarakat setelah viralnya kasus pembunuhan brigadir yoshua hutabarat dan kasus pembunuhan vina cirebon ditambah yang terbaru viralnya kasus lolosnya 11 catar (calon taruna) yang didominasi oleh anak pejabat polri sehingga terindikasi adanya nepotisme dalam tubuh polri dimulai dari penyeleksian anggotanya, menurut Mikael feka selaku pengamat hukum pidana universitas widya mandira (unwira) :

“perlu dibentuk tim dari mabes polri dengan dan pihak eksternal yang kompeten untuk melakukan audit dari tahap awal sampai tahap pengumuman hasil catar, slogan presisi tidak dapat diharapkan jika proses rekrutmen akpol masih menuai polemik di masyarakat, oleh karena itu proses rekrutmen catar akpol perlu dikontrol oleh para wakil rakyat di daerah dan di pusat”

“negara ini negara hukum demokratis, jadi masyarakat perlu berperan aktif dalam segala lini yang berkaitan dengan penegakan hukum. Kalau ada keseriusan dari kapolri dan dukungan politik dari wakil rakyat, saya yakin polemik ini akan terungkap kebenarannya”.¹⁰

Digitalisasi di era modern saat ini memberikan peluang untuk masyarakat ikut berperan aktif dalam mengawal kasus-kasus yang terjadi di Indonesia secara masif dan solidar, tanpa adanya biaya banyak namun efektif untuk mengontrol dan mengawasi kinerja penegak hukum atau elit politik sehingga kasusnya bisa terselesaikan tidak berhenti ditengah jalan.

⁹ Red. www.bbc.com “praktik sogokan di kepolisian disebut ‘hampir semua sektor dengan pola berbeda’ – kasus penjual bubur ayam setor uang ratusan juta ditipu oknum polisi” 20 Juni 2023, diakses pada Kamis 11 Juli 2024 23.26 wib.

¹⁰ Detik bali. www.detik.com “fakta fakta anak kapolda NTT lulus catar akpol meski disebut dapat nilai kecil” Rabu 10 Juli 2024, diakses pada Jum’at 12 Juli 2024 22.20 wib.

Sosial media dinilai lebih efektif dan efisien untuk mencari dukungan dan pengawasan terhadap suatu polemic yang terjadi secara transparan, hilangnya kepercayaan terhadap wakil rakyat (elit politik) serta partai politik menjadikan masyarakat enggan meminta bantuannya. Padahal, wakil rakyat dan partai politik merupakan indikator dari adanya sistem demokrasi sekaligus intitusi terkecil penggerak politik selain pemerintah.

Dalam kehidupan masyarakat peran partai politik telah tergantikan oleh sosial media, partai politik yang seharusnya mampu menjadi alat masyarakat dalam berkeluh kesah dan menyampaikan pendapatnya justeru masyarakat akan memilih sosial media untuk berkeluh kesah dan menyampaikan pendapat kritik dan sarannya, partai politik kembali *berhibernasi* setelah pemilihan umum telah berlangsung.

Investasi partai politik sebelum pemilu menjadikan proses *hibernasi* lebih tenang dan akan bangun kembali 1 tahun sebelum pemilihan umum berikutnya, kantor-kantor perwakilan partai politik kembali terkunci, laba-laba serta tikus-tikus kembali menguasai kantor partai politik, tikus-tikus mencari makan dari pembagian kue-kue hasil investasi sebelum pemilihan umum.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Staf divisi hukum dan monitoring peradilan ICW dan peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch) Diky Anandya mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023, tercatat ada 1.695 orang tersangka dan kerugian negara sebesar 28,4 triliun, “peningkatan yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya”¹¹. Sedangkan, menurut otoritas pengawasan dan anti-korupsi tertinggi cina, Cina menangani lebih dari 36 ribu kasus korupsi yang berdampak pada kepentingan publik pada paruh pertama 2023 lebih dari 52 ribu orang menjalani berbagai tindakan, seperti Pendidikan, bantuan hingga hukuman sebagai tanggapan atas kasus-kasus korupsi tersebut, menurut *Global Times* badan pengawas anti-korupsi pun berjanji untuk memberantas korupsi di Tingkat akar rumput di beberapa bidang. Bidang-bidang tersebut meliputi lapangan kerja, kewirausahaan, pendidikan, layanan kesehatan, pensiun, jaminan sosial,

¹¹ www.video.kompas.com “full icw ungkap ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang 2023 negara rugi rp 28,4 triliun” 19 mei 2024, diakses pada jumat 12 juli 2024 23.58 wib.

perlindungan ekologi dan lingkungan, keselamatan di tempat kerja, kemananan makanan dan obat-obatan, penegakan hukum serta sistem peradilan¹².

Contoh perbandingan antara indonesia dan china bukan berarti bahwa china lebih tinggi korupsinya daripada Indonesia. Akan tetapi keseriusan lembaga anti-korupsi dan pemerintah di china untuk memberantas korupsi, menurut *transparency international* merilis hasil indeks persepsi korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) tahun 2023, China berada di posisi 76 dari 180 negara di dunia dengan penilaian skor 42 dari 100. “Sedangkan Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara di dunia dengan penilaian skor 34 dari 100. Yang mana di tahun 2022 indonesia menempati posisi 110 dari 180 negara”.¹³

Meskipun Indonesia dan china berbeda sistem politiknya yakni komunisme dan demokrasi. Akan tetapi terdapat kesamaan yakni dalam hal populasi penduduk, menurut *worldometer* pada tanggal 12 juli 2024 tercatat populasi penduduk china sebanyak 1.425.162.500. sedangkan di Indonesia populasi penduduk pada tanggal 12 juli 2024 sebanyak 279.863.020¹⁴. perbedaan jumlah penduduk yang sangat signifikan justeru mampu membawa china menjadi negara adidaya kedua melawan kedigdayaan amerika serikat.

Peringkat pertama negara terbersih dari korupsi diraih negara Denmark dengan penilaian 90 dari 100. Denmark memiliki populasi penduduk sebanyak 5.940.569 pada 12 juli 2024 menurut *worldometers*. Perbedaan jumlah penduduk juga akan mempengaruhi kebijakan yang harus dilakukan. meskipun Denmark dan Indonesia memiliki kesamaan menggunakan sistem demokrasi, yakni demokrasi parlementer dan demokrasi reformasi.

Tahun 1998 pada saat mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR menjadi tahun reformasi demokrasi Pancasila. Namun, ketidaksiapan sistem demokrasi Pancasila yang akan dilaksanakan menjadikan kebimbangan tanpa arah kemana Indonesia akan melangkah, reformasi demokrasi Pancasila seharusnya menjadikan Pancasila dan nilai-nilai luhurnya untuk dapat menjadi acuan dalam perjalanan negara Indonesia dalam melangkah, seperti filosofis Pancasila *way of life* yakni semua aktivitas harus sesuai dengan sila Pancasila.

¹² Maharani esthi, www.internasional.republika.co.id “cina ungkao 36 ribu kasus korupsi dalam setengah tahun” selasa 29 Agustus 2023, diakses pada Sabtu 13 Juli 2024 00.10 wib.

¹³ Hardiantoro Alinda, mahardini nur afifah www.kompas.com “daftar negara paling korup di dunia 2023 versi transparency international” 30 Januari 2024, diakses pada Sabtu 13 Juli 2024, 00.41 wib.

¹⁴ www.worldometers.info.translate.google “world population china” diakses pada sabtu 13 Juli 2024 01.04 wib.

Pancasila sebagai *way of life* seharusnya menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan, peraturan-peraturan ataupun amandemen perundangan, apakah sebuah kebijakan telah terdapat salah satu poin dari 5 nilai dasar tersebut dan tidak pula bertentangan dengan poin yang lainnya.

Pancasila dengan 5 silanya :

1. Ketuhanan yang maha esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksana dalam permusyawaratan perwakilan.
5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi bisa terlihat dari ketidakpercayaannya masyarakat terhadap partai politik. Partai politik yang seharusnya selalu bersama rakyat setiap waktu sebelum dan sesudah pemilu untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat kepada wakil rakyatnya yang telah mereka usung dan dipilih oleh masyarakat.

Janji tinggal janji setelah calon elit politik memenangkan pemilihan umum, modal yang telah mereka keluarkan dalam proses kampanye politik mencapai angka yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan gaji+tunjangan kerja selama 5 tahun, sehingga membuat oknum elite politik banyak yang melakukan tindakan KKN untuk mengembalikan modal beserta keuntungannya.

Namun, kita perlu melihat sebelum terjadinya pemilihan, masyarakat secara tidak sadar juga telah melakukan tindak pidana menerima suap (kolusi) dengan cara menjual suaranya, padahal jual beli suara ini tidak sesuai dengan tujuan pemilu LUBER JURDIL (langsung umum bebas rahasia jujur dan adil).

Proses money politik sudah menjadi rahasia umum yang membuat lembaga pemberantas korupsi pun tidak mampu untuk menangkapnya, masyarakat sejatinya telah menjual negara ini dengan harga yang murah disaat pemilihan umum berlangsung, terutama oleh mereka yang memiliki ekonomi rendah serta pendidikan rendah, sehingga perlunya pendidikan keuangan/ekonomi serta Pendidikan tinggi semakin dipermudah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Edward aspinal & ward Berenschot* dalam buku "*democracy for sale (pemilu, klientilisme, dan negara di Indonesia)*" perilaku

patronase klientilistik (relasi pertukaran patron antara seseorang yang memiliki status sosial-ekonomi yang tinggi dan klien dengan seseorang dengan sosial ekonomi rendah) merupakan praktek KKN, yang sudah merambah ke Tingkat RW (Rukun Warga) untuk menyediakan dukungan electoral kepada salah satu calonnya.

Praktek korupsi oleh pejabat pemerintahan telah berjalan di era penjajahan hingga era orde baru. sedangkan, di era reformasi ini korupsi menjangar secara keseluruhan sektor sampai ke akar rumput dan sudah menjadi lebih umum, Adapun dampaknya adalah hilangnya nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman berdemokrasi.

Indonesia yang kaya akan SDM (banyaknya populasi penduduk) serta SDA (luasnya dan suburnya wilayah indonesia) telah di korupsi oleh segelintir orang, tujuan baik adanya undang-undang desentralisasi dan otonomi daerah tahun 2004 serta dana desa tahun 2015 semakin menambah fakta gejala korupsi akut pada negara Indonesia.

Praktik money politik tidak hanya terjadi di elite politik skala nasional, dalam pemilihan kepala desa juga sudah terdapat praktek money politik, padahal dampak paling massif dari praktik money politik adalah menjadikan pemimpin yang korup dan tidak mementingkan kepentingan umum.

Patronase politik juga menjadikannya plutokrasi, plutokrasi adalah system politik yang dikuasai pemilik modal/kapitalis, kaum kapitalis menyetir roda pemerintahan dengan membeli kebijakan dari wakil rakyat selaku legislative (pembuat undang-undang) yang menguntungkannya. Dampak dari perjanjian sebagai pada saat pembiayaan kampanye sebelum pemilihan umum.

Indonesia sebagai negara demokrasi yang seharusnya mewujudkan kedaulatan untuk rakyat justeru semakin hancur, representasi demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” menjadi tidak terwujud karena semakin banyaknya plutokrasi, korupsi akut ini menjadikan susahnyanya maju secara independent saat pemilihan umum. Para kapitalis akhirnya menyerahkan dirinya masuk ke dalam partai politik.

Di Indonesia kekuatan partai politik lebih tinggi daripada kepentingan rakyat, para wakil rakyat dari berbagai fraksi akan mengikuti semua arahan dari keputusan partai politik melalui ketua umunya, seperti yang pernah viral apa yang disampaikan oleh Bambang pacul saat menjabat DPR RI dari fraksi PDI-Perjuangan. Partai politik sebagai salah satu indikator negara berdemokrasi justeru semakin melemahkan demokrasi Pancasila reformasi,

kedaulatan bukan lagi ada di tangan rakyat, tapi berada di tangan partai politik dengan anggapan partai politik adalah representasi dari rakyat.

Reformasi dan restrukturisasi partai politik diperlukan, partai politik harus berazas Pancasila, kegagalan dalam menciptakan kader dan memberi pendidikan politik kepada masyarakat, partai politik seharusnya selalu siap sedia untuk rakyat, meskipun pemilihan umum telah berlalu, partai politik seharusnya menjadi wakil dari wakil rakyat yang telah di usungnya untuk mendengar aspirasi rakyat.

“belum begitu lama, para ahli berharap bahwa modernisasi, pertumbuhan ekonomi dan demokrasi akan secara perlahan mendorong para politisi untuk meninggalkan praktik-praktik klientalistik dan fokus pada pertimbangan terhadap proposal-proposal kebijakan sebagai sarana utama untuk menggalang suara”¹⁵. Menurut aspinal modernisasi, pertumbuhan ekonomi dan demokrasi diharapkan mampu merubah system klientalistik-patronase yang telah menjadi rahasia umum di Indonesia dan menjadi cikal bakal korupsi, kolusi, nepotisme,.

1. Kesadaran demokrasi Pancasila melalui Pendidikan Pancasila terhadap masyarakat sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas nasionalisme serta kebersamaan bersama melalui gotong royong, nilai Pancasila mulai terdegradasi dengan adanya globalisasi, generasi penerus bangsa lebih mengetahui dan menyukai nilai-nilai dari negara lain daripada nilai-nilai Pancasila. Semestinya partai politik sebagai penegak demokrasi mampu melaksanakan tugas dalam hal Pendidikan nilai Pancasila serta Masyarakat mampu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2. Di era modernisasi dan di negara-negara maju sangat memperhatikan Pendidikan-pendidikan formal, modernisasi dan Pendidikan mampu menanggapi permasalahan korupsi, kolusi, nepotisme, salah satu contohnya adalah negara Finlandia yang menjadi negara nomor 2 terbersih di dunia menurut *Corruption Perspetion Index* (CPI) dengan perolehan skor 88 dari 100. Rendahnya Tingkat Pendidikan tinggi di Indonesia juga menjadi problem serius yang harus segera diatasi jika ingin menjadikan system demokrasi di Indonesia berjalan tanpa korupsi.

¹⁵ Aspinal Edward & ward Berenschot, “*Democracy For Sale*” Yayasan Pustaka obor idonesia, Jakarta 2020 hal 3.

3. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadi persoalan utama di negara Indonesia, minimnya Pendidikan keuangan/ekonomi menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi, elite politik serta partai politik semestinya menjadi jembatan memberikan Pendidikan keuangan sampai ke akar rumput, jangan hanya mencari suara saat pemilu sampai ke akar rumput, tapi manfaat adanya partai politik juga harus sampai ke akar rumput.

Rezim Reformasi menempatkan isu pemberantasan KKN sebagai isu utama lebih disebabkan kesadaran kolektif bahwa demokrasi yang bisa mensejahterakan rakyat tidak mungkin dapat berjalan selama KKN masih menggurita di Indonesia. Namun sayang, masa transisi demokrasi (baca: pasca reformasi) yang terjadi di Indonesia tidak memberi ruang yang cukup pada gerakan-gerakan pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah lembaga ad-hoc yang khusus dibentuk untuk memberantas korupsi hanya bertaji di awal- awal berdirinya.

Membaca genealogi korupsi yang terjadi pada masa Indonesia modern, perilaku korupsi pada masa transisi demokrasi atau era pasca reformasi justru menunjukkan gejala yang lebih massif. Meminjam istilah Al-Attas, korupsi di era reformasi menuju pada apa yang disebut self destruction. Data dari International Transparency menunjukkan bahwa indeks korupsi di Indonesia pada masa transisi demokrasi tidak pernah menembus angka 3. Data ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi pada masa transisi demokrasi masih menjadi pekerjaan berat.

Satu hal yang harus digaris-bawahi, perilaku korupsi pada masa transisi demokrasi di Indonesia menyebar merata di semua pusat-pusat kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi pintu gerbang semakin merajalelanya korupsi di Indonesia. Pernyataan berikut ini menjelaskan hal tersebut:

Korupsi yang menjerat pejabat di daerah, khususnya gubernur, walikota/bupati sungguh mencengangkan. Dari data Kementerian Dalam Negeri, saat ini ada 148 kepala daerah sudah divonis bersalah menyalahgunakan uang negara, menjadi terdakwa, tersangka, atau baru diperiksa sebagai saksi. Perinciannya, dari 33 gubernur se-Indonesia, 18 gubernurnya terlibat kasus korupsi. Sementara bupati/walikota sebanyak 130 dari 491 kabupaten/kota yang terlibat korupsi. Artinya, semangat pemberantasan korupsi pada masa transisi demokrasi hanya menjadi lip service, jauh panggang dari api.

Satu-satunya cara untuk menjaga masa transisi demokrasi agar berjalan pada track yang benar adalah dengan memperkuat eksistensi KPK. KPK sebagai lembaga yang khusus menangani tindak pidana korupsi harus diberi ruang yang cukup untuk bekerja, tanpa intervensi dari kekuasaan. Namun, masalahnya tidak semudah itu. Seperti yang sudah kita singgung di atas, masa transisi demokrasi saat ini sebetulnya bukan kehendak kolektif bangsa Indonesia. Reformasi hadir sebagai respon atas krisis moneter yang melanda Asia. Oleh karena itu, membebaskan pemberantasan korupsi hanya pada KPK adalah hal yang tidak bijak. Eksistensi KPK juga harus didukung oleh elit (penguasa). Hal ini menjadi penting karena masa transisi demokrasi tidak akan berujung pada demokrasi selama kalangan elit tidak mendukungnya. Kasus di Indonesia menunjukkan bahwa masa transisi demokrasi tidak bergerak kemana-mana lebih disebabkan tidak adanya kesadaran elit. Para elit di era pasca-reformasi tidak memberi ruang yang cukup untuk tumbuh suburnya gerakan-gerakan anti-korupsi. Alih-alih berperilaku anti-korupsi, para elit justru mempertontonkan perilaku korupsi secara terang-benderang dan massif.

C. KESIMPULAN

Eksistensi demokrasi Pancasila semakin menurun akibat merambahnya praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme di semua sektor. Jika tetap bersikukuh menggunakan system demokrasi Pancasila, partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk mereformasi dirinya kearah lebih baik, partai politik mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menciptakan kader-kader elit politisi yang berkualitas dan berasas Pancasila. Partai politik ikut berperan aktif dalam Pendidikan dan pengamalan nilai Pancasila dalam masyarakat serta Pendidikan untuk penguatan ekonomi kerakyatan, disisi lain partai politik melalui politisinya bersedia memperjuangkan Masyarakat dapat mengenyam Pendidikan tinggi serta revolusi Pendidikan formal di Indonesia. Kerjasama antara pemerintah, partai politik serta Masyarakat sangat diperlukan sebagai *human security* serta *ideologic security* untuk mampu bersaing dengan negara lainnya dalam persaingan di era globalisasi, peperangan di era globalisasi lebih halus karena tidak menggunakan senjata, akan tetapi peperangan terhadap ideologi. Ideologi bangsa indonesia yang tercantum dalam Pancasila perlu di jabarkan dan sebarluaskan menjadi butir butir nilai yang lebih spesifik dan detail, sehingga memudahkan dalam proses pengamalannya, sejatinya ideologi Pancasila mampu bersaing dalam persaingan di era globalisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/benarkah-budaya-korupsi-indonesia-warisan-belanda/>
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0pe6e71v2o>
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/23/190000065/daftar-pimpinan-kpk-yang-terlibat-kasus-hukum-terbaru-firli-bahuri?page=all>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240701132839-12-1116202/8-tahun-di-kpk-alex-marwata-merasa-gagal-berantas-korupsi>
<https://news.detik.com/berita/d-4994630/deretan-jaksa-yang-malah-diadili-karena-kasus-korupsi/1>
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c80d1zw0kz0o>
<https://www.detik.com/bali/nusra/d-7431387/fakta-fakta-anak-kapolda-ntt-lulus-catar-akpol-meski-disebut-dapat-nilai-kecil>
<https://video.kompas.com/watch/1457455/full-icw-ungkap-ada-791-kasus-korupsi-di-indonesia-sepanjang-2023-negara-rugi-rp-284-triliun>
<https://internasional.republika.co.id/berita/s058fa335/cina-ungkap-36-ribu-kasus-korupsi-dalam-setengah-tahun>
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/30/180000965/daftar-negara-paling-korup-di-dunia-2023-versi-transparency-international>
https://www.worldometers-info.translate.google/world-population/china-population/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
<https://www.transparency.org/en/cpi> Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index.
[Http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=156239:148-gubernur-a-bupati-terlibat-korupsi-&catid=17:nasional&Itemid=30](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=156239:148-gubernur-a-bupati-terlibat-korupsi-&catid=17:nasional&Itemid=30)